

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan strategis di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan Daerah. Perencanaan Daerah dalam bentuk Rencana Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan manifestasi kontrak politik Bupati terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

Dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Rencana Kerja dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019 dengan fokus pada bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil. Program dan kegiatan tersebut disusun dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019. Adapun nomenklatur program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara

evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  
rencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2017-2022;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2009 tentang Program Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Bupati Kulon Nomor 43 Tahun 2018 tentang RKPD Tahun 2019
10. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 364/A/2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2019 dan kelanjutan pelaksanaan Renstra OPD terdahulu.
2. Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah :
  - a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja OPD sebagai wujud pertanggungjawaban dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan kebijakan pembangunan daerah;
  - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - d. Memantapkan pelaksanaan pembangunan data dan informasi kependudukan dan catatan sipil yang akurat dan mutakhir;

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) OPD ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Dinas meliputi latar belakang penyusunan, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penulisan.

**BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini menguraikan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas tahun-tahun sebelumnya.

**BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan mengenai telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, tujuan dan sasaran Renja Dinas, program dan kegiatan Dinas

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB V. PENUTUP**

Bab ini berisi uraian penutup yang meliputi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut

## 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil menjadi salah satu urusan wajib bagi kewenangan/tanggung jawab Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat adalah jenis non pelayanan dasar yaitu pelayanan Dokumen Kependudukan meliputi :

1. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
3. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
4. Cakupan Penerbitan Akta Kematian

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Kabupaten Kulonprogo Tahun 2017 sebagai berikut:

- 1) Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan = 332.419

Jumlah Penduduk Wajib KTP = 341.153

$$\frac{332.419}{341.153} \times 100 \% = 97,44\%$$

=

- 2) Cakupan penerbitan akta kelahiran

Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun 2017 =

4.224 orang

Jumlah kelahiran ditahun 2016 = 4.374 orang

$$\frac{4.224}{4.374} \times 100 \% = 96,57 \%$$

=

- 3) Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Jumlah Kepala Keluarga di tahun 2017 = 148.931 orang

Jumlah KK yang diterbitkan = 148.931 orang

$$\frac{148.931}{148.931} \times 100 \% = 100 \%$$

=

#### 4) Cakupan penerbitan Akta Kematian

Jumlah kematian ditahun yang bersangkutan = 2.346 orang

Jumlah kutipan akta kematian yang diterbitkan = 2.318 orang

$$\frac{2.318}{2.346} \times 100 \% = 98,81 \%$$

=

Data capaian SPM tahun 2017 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Target dan Realisasi SPM Urusan Dukcapil Tahun 2017

| Jenis Pelayanan Dasar          | Nasional                                      | Capaian Daerah | Keterangan             |             |                |  |
|--------------------------------|---|----------------|------------------------|-------------|----------------|--|
|                                | Indikator                                     | Nilai          | Batas waktu pencapaian | Target 2016 | Realisasi 2017 |  |
| Pelayanan Dokumen Kependudukan | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | 100%           | 2015                   | 100 %       | 97,44 %        |  |
|                                | Cakupan penerbitan Akta Kelahiran             | 90 %           | 2020                   | 100%        | 96,57 %        |  |
|                                | Cakupan penerbitan KK                         | 100 %          | 2015                   | 100%        | 100 %          |  |
|                                | Cakupan penerbitan Akta Kematian              | 70 %           | 2020                   | 65%         | 98,81 %        |  |

Dari tabel data diatas dapat dilihat bahwa capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo telah melampaui target yang ditetapkan kecuali pada indikator cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada indikator cakupan penerbitan Akta Kelahiran. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut :

- a.i.1. Masih adanya penduduk yang berada di luar negeri;
- a.i.2. Masih banyak penduduk yang belum melakukan perekaman;
- a.i.3. Masih berlangsungnya proses konsolidasi;

- a.i.4. Masih banyak penduduk yang memiliki data ganda;
- a.i.5. Ketersedian blangko KTP-el sudah habis, menunggu distribusi dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
- a.i.6. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan kegiatannya mengacu pada indikator kinerja yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 – 2022. Secara rinci pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dalam tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3.  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KULON PROGO

| No  | Indikator                                     | SPM/Standar Nasional | IKK   | Target Renstra SKPD | Realisasi Capaian     |                       | Proyeksi           |                       | Catatan Analisis      |                       |                    |                       |  |
|-----|---|----------------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|
|     |   |                      |   |                     | Tahun 2017 (thn n -2) | Tahun 2018 (thn n -1) | Tahun 2019 (thn n) | Tahun 2020 (thn n +1) | Tahun 2016 (thn n -3) | Tahun 2017 (thn n -2) | Tahun 2019 (thn n) | Tahun 2020 (thn n +1) |  |
| (1) | (2)   | (3)                  | (4)   | (5)                 | (6)                   | (7)                   | (8)                | (9)                   | (10)                  | (11)                  | (12)               | (13)                  |  |
| 1.  | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | 100%                 | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | 100%                | 100%                  | 100%                  | 100%               | 100%                  | 95,92%                | 97,44%                | 97,44%             | 97,46%                |  |
| 2.  | Cakupan penerbitan Akta Kelahiran             | 90 %                 | Cakupan penerbitan Akta Kelahiran             | 90%                 | 90%                   | 90%                   | 90%                | 90%                   | 96,55%                | 96,57%                | 96,57%             | 96,58%                |  |
| 3.  | Cakupan penerbitan KK                         | 100 %                | Cakupan penerbitan KK                         | 100%                | 100%                  | 100%                  | 100%               | 100%                  | 100%                  | 100%                  | 100%               | 100%%                 |  |
| 4.  | Cakupan penerbitan Akta Kematian              | 70 %                 | Cakupan penerbitan Akta Kematian              | 64%                 | 66%                   | 68%                   | 70%                | 70%                   | 98,76%                | 98,81%                | 98,81%             | 98,82%                |  |

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam skala nasional dan menjamin kepastian hukum hak sipil penduduk, maka Pemerintah dengan dukungan DPR RI telah memprogramkan 3 (tiga) program strategis nasional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi pemutakhiran data kependudukan, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penerapan KTP elektronik.

Tiga program strategis nasional tersebut merupakan reformasi mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, dalam rangka peningkatan efektivitas pelayanan public, peningkatan keamanan Negara dan efektivitas perencanaan pembangunan serta perumusan kebijakan pemerintahan. Dengan program tersebut, maka terbangun pula database kependudukan yang online di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

Melalui akurasi database kependudukan yang berbasis NIK, maka dapat diterbitkan KTP elektronik yang berlaku secara nasional, sehingga tidak diperlukan lagi KTP daerah/local sebagai persyaratan pelayanan public. KTP elektronik juga mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat karena tidak dapat dipalsu-kan, sehingga dapat membantu meningkatkan keamanan Negara karena secara otomatis akan mempersempit ruang gerak tindakan criminal, teroris, TKI illegal, perdagangan orang dan manipulasi dokumen perbankan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan beberapa perubahan. Pada pasal 79A disebutkan bahwa "*Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya*". Sebagai implikasi dari amanat Undang-undang tersebut maka terhitung mulai tanggal 27 Januari 2014 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo menghentikan pemungutan retribusi dari pelayanan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil. Sedangkan untuk denda keterlambatan atas permohonan surat/akta masih tetap dipungut sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 67 Tahun 2010 tentang Denda Keterlambatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo juga menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik untuk dialokasikan dalam Program Pelayanan pendaftaran Penduduk, Program Pelayanan Pencatatan Sipil dan Program Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mulai tahun 2017 sebagai pengalihan dari Dana Tugas Pembantuan Bidang Administrasi Kependudukan yang dialokasikan pada tahun 2014, 2015 dan 2016.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

#### **3.2.1. Tujuan OPD**

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan pencatatan sipil;
- b) Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- c) Tersedianya data dan informasi kependudukan yang akurat dan mutakhir (*real time*);

#### **3.2.2 Sasaran OPD**

- a) Terpenuhinya kepastian hukum dan hak-hak sipil penduduk;
- b) Terwujudnya aparatur pelayanan yang professional dan kompeten;
- c) Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang memadai;
- d) Meningkatnya pemahaman masyarakat akan kewajibannya dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;
- e) Tersedianya data dan informasi kependudukan yang akurat dan mutakhir dan mudah diakses masyarakat.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Yang menjadi pertimbangan pengajuan kegiatan dalam rencana kerja tahun 2019 ini adalah untuk lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka mendukung tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2019 yakni memperkuat daya saing daerah guna mendorong kemandirian ekonomi peningkatan investasi dan pengurangan kemiskinan. Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu urusan dasar dan wajib pemerintah yang merupakan hak dasar setiap warga Negara.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2019 meliputi 6 (enam) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Kegiatan Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran;

- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Keuangan;
  - c. Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi.
2. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD
    - a. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
    - b. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
    - c. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal.
  3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
    - a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD;
    - b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan;
    - c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;
  4. Program Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
    - a. Kegiatan Pencatatan dan Penerbitan Identitas Penduduk;
    - b. Kegiatan Pencatatan dan Penerbitan Dokumen Pindah datang Penduduk;
    - c. Kegiatan Penyusunan Profil dan Monitoring Evaluasi Kependudukan;
    - d. Kegiatan Pendataan Kependudukan;
  5. Program Administrasi Pencatatan Sipil
    - a. Kegiatan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran;
    - b. Kegiatan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian;
    - c. Kegiatan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Perubahan Status Anak.
  6. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    - a. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SIAK;
    - b. Kegiatan Pengelolaan Dokumen dan Akta Catatan Sipil;
    - c. Kegiatan Pengelolaan Database Kependudukan;
    - d. Kegiatan Sosialisasi kebijakan Administrasi Kependudukan;
    - e. Kegiatan Fasilitasi Inovasi Pelayanan dan Pemanfaatan data kependudukan;
    - f. Kegiatan Pengembangan Aplikasi SIAK.

:



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan tujuan , sasaran, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017-2022, maka dilaksanakan rencana program dan kegiatan, prioritas daerah, sasaran daerah, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran dan program OPD sesuai dengan urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga didukung program dan kegiatan setiap OPD yang dilaksanakan untuk peningkatan kualitas pelayanan perkantoran dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja OPD.

Selanjutnya rincian program dan kegiatan, prioritas daerah, sasaran daerah, indikator kinerja dan pendanaan indikatif APBD tahun 2019 sebagaimana tabel 4.1 dan rencana program dan kegiatan dan pendanaan indikatif APBD Propinsi sebagaimana tabel 4.2, sedangkan rincian program dan kegiatan , prioritas daerah, sasaran daerah, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan tahun 2019 sebagaimana tabel 4.3. berikut :

Tabel 4.1.  
**RUMUSAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 2019  
 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020**

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL

JUMLAH : Rp. 1.388.400.775  
 PAGU

Sumber Dana: APBD  
 Kabupaten

| NO                            | URUSAN,<br>PROGRAM,<br>KEGIATAN                     | PRIORITAS<br>DAERAH  | SASARAN<br>DAERAH                                   | LOKASI                   | INDIKATOR KINERJA   |        |  |          |  |            | PAGU<br>INDIKATI<br>F (RP) | PRAKIRAA<br>N MAJU | KETERANGAN                 |  |
|-------------------------------|---|--|---|--------------------------|---|--------|--|----------|--|------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--|
|                               |   |  |   |                          | HASIL PROGRAM   |        | KELUARAN KEGIATAN  |          | HASIL KEGIATAN   |            |                            |                    | JENIS<br>KEGIA<br>TAN      | OPD  |
|                               |   |  |   |                          | TOLOK<br>UKUR   | TARGET | TOLOK UKUR   | TARGET   | TOLOK UKUR   | TARGE<br>T |                            |                    |                            |  |
| 1                             | 2   | 3  | 4   | 5                        | 6   | 7      | 8  | 9        | 10   | 11         | 12                         | 13                 | 14                         | 15   |
| 2.06.2<br>.06.01<br>.01.01    | Program<br>Pelayanan<br>Administrasi<br>Perkantoran |  |   |                          | Cakupan<br>pelayanan<br>administras<br>i<br>perkantora<br>n | 20%    |  |          |  |            | 239.996.<br>000            | 244.000.0<br>00    |                            |  |
| 2.06.2.<br>06.01.0<br>1.01.26 | Penyediaan<br>jasa dan<br>peralatan<br>perkantoran  | Peningkatan<br>kualitas<br>penyelengga<br>raan<br>pemerintaha<br>n | Meningkat<br>nya Tata<br>Kelola<br>Pemerinta<br>han | Lingkup<br>Kabupat<br>en |   |        | Jasa perkantoran<br>(jasa persuratan, jasa<br>pegawai tidak tetap)<br>dan tersedianya<br>peralatan kantor<br>(alat tulis kantor,<br>cetak, penggandaan<br>dan bahan pustaka) | 12 bulan | Dukungan<br>sebesar 5 %<br>terhadap<br>cakupan<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran | 100 %      | 174.261.<br>400            | 160.000.00<br>0    | Sedan<br>g<br>Berjala<br>n | Dinas<br>Kependu<br>dukan<br>dan<br>Pencatat<br>an Sipil |
| 2.06.2.<br>06.01.0<br>1.01.27 | Penyediaan<br>jasa<br>administrasi<br>keuangan      | Peningkatan<br>kualitas<br>penyelengga<br>raan<br>pemerintaha<br>n | Meningkat<br>nya Tata<br>Kelola<br>Pemerinta<br>han | Lingkup<br>Kabupat<br>en |   |        | Honorarium petugas<br>penatausahaan<br>keuangan dan<br>barang  | 12 bulan | Dukungan<br>sebesar 5 %<br>terhadap<br>cakupan<br>pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran | 100 %      | 33.734.6<br>00             | 34.000.00          | Sedan<br>g<br>Berjala<br>n | Dinas<br>Kependu<br>dukan<br>dan<br>Pencatat<br>an Sipil |

|                                     |  |   |                                       |                   |   |            |   |             |  |       |                   |                   |                 |   |
|-------------------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------|---|------------|---|-------------|--|-------|-------------------|-------------------|-----------------|---|
| 2.06.2.<br>06.01.0<br>1.01.28       | Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi            | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan | Lingkup Kabupaten |   |            | Makanan dan minuman untuk rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi   | 12 bulan    | Dukungan sebesar 10 % terhadap cakupan pelayanan administrasi perkantoran              | 100 % | 32.000.000        | 50.000.000        | Sedang Berjalan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| <b>2.06.2<br/>.06.01<br/>.01.12</b> | <b>Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja</b> |   |                                       |                   | <b>Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja</b> | <b>20%</b> |   |             |  |       | <b>38.670.375</b> | <b>49.827.708</b> |                 |   |
| 2.06.2.<br>06.01.0<br>1.12.01       | Penyusunan perencanaan kinerja SKPD                          | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan | Lingkup Kabupaten |   |            | Rencana kerja OPD 2020 , Perubahan Renja OPD 2019 dan Review Renstra 2017-2022  | 3 dokumen   | Dukungan sebesar 6.6 % terhadap capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja | 100 % | 17.715.750        | 18.542.250        | Sedang Berjalan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.06.2.<br>06.01.0<br>1.12.02       | Penyusunan pelaporan keuangan SKPD                           | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan | Lingkup Kabupaten |   |            | Laporan keuangan SKPD   | 14 dokumen  | Dukungan sebesar 6.6 % terhadap capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja | 100 % | 16.505.875        | 31.112.000        | Sedang Berjalan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.06.2.<br>06.01.0<br>1.12.03       | Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja                 | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan | Lingkup Kabupaten |   |            | Laporan capaian kinerja SKPD, evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, semesteran, LAKIP, Laporan Tahunan dan Laporan SPIP | 21. dokumen | Dukungan sebesar 6.8 % terhadap capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja | 100 % | 10.448.750        | 17.345.800        | Sedang Berjalan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| 2.06.2<br>.06.01<br>.01.11    | Program Peningkatan Sarana /Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD |   |                                       |                   | Capaian Peningkatan Sarana Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD | 20% |   |         |   |       | 345.560.700 | 456.000.000 |                 |   |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------|---|-----|---|---------|---|-------|-------------|-------------|-----------------|---|
| 2.06.2.<br>06.01.0<br>1.11.01 | Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran                       | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan | Lingkup Kabupaten |   |     | Mesin antrian   | 1 paket | Dukungan sebesar 5 % terhadap capaian peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran  | 100 % | 131.270.200 | 150.000.000 | Sedang Berjalan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                               |  |   |                                       |                   |   |     | Laptop  | 3 unit  |   |       |             |             |                 |   |
|                               |  |   |                                       |                   |   |     | Kendaraan Roda 2  | 1 unit  |   |       |             |             |                 |   |
|                               |  |   |                                       |                   |   |     | TV 40 inch  | 1 unit  |   |       |             |             |                 |   |
|                               |  |   |                                       |                   |   |     | Komputer  | 1 unit  |   |       |             |             |                 |   |
|                               |  |   |                                       |                   |   |     | Rak arsip kayu  | 2 unit  |   |       |             |             |                 |   |
|                               |  |   |                                       |                   |   |     | Printer laser jet   | 3 unit  |   |       |             |             |                 |   |
|                               |  |   |                                       |                   |   |     | Modem   | 1 unit  |   |       |             |             |                 |   |
|                               |  |   |                                       |                   |   |     | Komputer PC   | 1 unit  |   |       |             |             |                 |   |
|                               |  |   |                                       |                   |   |     | Printer Laser HP Pro MFP M426 fdn   | 2 unit  |   |       |             |             |                 |   |
| 2.06.2.<br>06.01.0<br>1.11.02 | Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran                    | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan | Lingkup Kabupaten |   |     | pemeliharaan kendaraan roda 4, pemeliharaan kendaraan roda 2, pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan AC, pemeliharaan computer/ laptop , pemeliharaan printer, pemeliharaan mesin antrian, pemeliharaan mesin ketik, pemeliharaan mesin fax | 50 unit | Dukungan sebesar 12 % terhadap capaian peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran | 100 % | 208.290.500 | 300.000.000 | Sedang Berjalan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.06.2.<br>01.01.1            | Pendidikan dan Pelatihan   | Peningkatan kualitas                              | Meningkatnya Tata                     | Lingkup Kabupaten |   |     | Pendidikan dan pelatihan non formal   | 6 orang | Dukungan sebesar 3%   | 100%  | 6.000.000   | 6.000.000   | Sedang          | Dinas Kependu                           |

|                           |   |   |                                       |                   |   |             |   |               |  |       |                    |                    |                 |   |
|---------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------|---|-------------|---|---------------|--|-------|--------------------|--------------------|-----------------|---|
| 3.03                      | non formal                                      | penyelenggaraan pemerintahan                      | Kelola Pemerintahan                   | en                |   |             |   |               | terhadap capaian peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia               |       |                    |                    | Berjalan        | dukungan dan Pencatatan Sipil           |
| <b>2.06.2.06.01.01.15</b> | <b>Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>   |   |                                       |                   | <b>Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b> | <b>100%</b> |   |               |  |       | <b>296.621.000</b> | <b>418.000.000</b> |                 |   |
| 2.06.2.06.01.01.15.33     | Pencatatan dan penerbitan Identitas Penduduk    | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan | Lingkup Kabupaten |   |             | Kartu Tanda Penduduk                                    | 4.000 keping  | Dukungan sebesar 63,96 % terhadap cakupan pelayanan pendaftaran penduduk | 100 % | 183.716.500        | 225.000.000        | Sedang Berjalan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                           |   |   |                                       |                   |   |             | Kartu Tanda Penduduk (DAK)                              | 4.000 keping  |  |       |                    |                    |                 |   |
|                           |   |   |                                       |                   |   |             | Kartu Keluarga  | 15.500 set    |  |       |                    |                    |                 |   |
|                           |   |   |                                       |                   |   |             | Kartu Keluarga (DAK)                                    | 15.500 set    |  |       |                    |                    |                 |   |
|                           |   |   |                                       |                   |   |             | Terekamnya KTP-el penduduk                              | 6.000 Orang   |  |       |                    |                    |                 |   |
|                           |   |   |                                       |                   |   |             | Kartu Identitas Anak (DAK)                              | 20.000 keping |  |       |                    |                    |                 |   |
| 2.06.2.06.01.01.15.36     | Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan | Lingkup Kabupaten |   |             | Publikasi pelayanan Administrasi Kependudukan           | 1 kali        | Dukungan sebesar 17% terhadap cakupan pelayanan Pendaftaran Penduduk     | 100%  | 42.004.100         | 108.000.000        |                 |   |
|                           |   |   |                                       |                   |   |             | Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil | 600 orang     |  |       |                    |                    |                 |   |
|                           |   |   |                                       |                   |   |             | Publikasi melalui media luar ruang                      | 2 paket       |  |       |                    |                    |                 |   |



|                                     |  |   |                                       |                   |  |  |  |              |  |       |                    |                    |                 |   |
|-------------------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------|--|--|--|--------------|--|-------|--------------------|--------------------|-----------------|---|
| 2.06.2.<br>06.01.0<br>1.15.38       | Pendataan Kependudukan                                   | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan | Lingkup Kabupaten |  |  | Updating elemen data kependudukan            | 3 Kecamatan  | Dukungan sebesar 8.05 % terhadap cakupan pelayanan pendaftaran penduduk  | 100 % | 25.410.000         | 35.000.000         | Sedang Berjalan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.06.2.<br>06.01.0<br>1.15.34       | Pencatatan dan penerbitan Dokumen Pindah Datang Penduduk | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan | Lingkup Kabupaten |  |  | Surat Keterangan Pindah                      | 1000 dokumen | Dukungan sebesar 10,99 % terhadap cakupan pelayanan pendaftaran penduduk | 100 % | 45.490.400.        | 50.000.000         | Sedang Berjalan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                                     |  |   |                                       |                   |  |  | Surat Keterangan Datang                      | 1016dokumen  |  |       |                    |                    |                 |   |
|                                     |  |   |                                       |                   |  |  | Surat Keterangan Pindah (DAK)                | 980 dokumen  |  |       |                    |                    |                 |   |
|                                     |  |   |                                       |                   |  |  | Surat Keterangan Datang (DAK)                | 1000 dokumen |  |       |                    |                    |                 |   |
|                                     |  |   |                                       |                   |  |  |  |              |  |       |                    |                    |                 |   |
| <b>2.06.2<br/>.06.01<br/>.01.16</b> | <b>Program Pelayanan Pencatatan Sipil</b>                |   |                                       |                   |  |  | <b>Capaian administrasi pencatatan sipil</b> |              |  |       | <b>121.106.500</b> | <b>140.000.000</b> |                 |   |
| 2.06.2.<br>06.01.0<br>1.16.01       | Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran                 | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan | Lingkup Kabupaten |  |  | akta kelahiran (DAK)                         | 1000 dokumen | Dukungan sebesar 47,41 % terhadap cakupan pelayanan pencatatan sipil     | 100 % | 39.910.000         | 55.000.000         | Sedang Berjalan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                                     |  |   |                                       |                   |  |  | akta kelahiran                               | 4000 dokumen |  |       |                    |                    |                 |   |

|                                      |   |   |                                       |                   |  |              |                       |              |  |       |                    |                    |                 |   |
|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------|--|--------------|-----------------------|--------------|--|-------|--------------------|--------------------|-----------------|---|
| 2.06.2.<br>06.01.0<br>1.16.02        | Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian          | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan | Lingkup Kabupaten |  |              | Akta Perkawinan       | 70 dokumen   | Dukungan sebesar 26,65% terhadap cakupan pelayanan pencatatan sipil                                    | 100 % | 31.126.400         | 32.000.000         | Sedang Berjalan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                                      |   |   |                                       |                   |  |              | Akta Perceraian       | 1 dokumen    |  |       |                    |                    |                 |   |
|                                      |   |   |                                       |                   |  |              | Akta Perkawinan (DAK) | 70 dokumen   |  |       |                    |                    |                 |   |
|                                      |   |   |                                       |                   |  |              | Akta Perceraian (DAK) | 1 dokumen    |  |       |                    |                    |                 |   |
| 2.06.2.<br>06.01.0<br>1.16.03        | Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Perubahan Status Anak | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan | Lingkup Kabupaten |  |              | Akta kematian         | 5000 dokumen | Dukungan sebesar 22,74 % terhadap cakupan pelayanan pencatatan sipil                                   | 100 % | 50.070.100         | 53.000.000         | Sedang Berjalan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                                      |   |   |                                       |                   |  |              | Akta Kematian (DAK)   | 1000 dokumen |  |       |                    |                    |                 |   |
|                                      |   |   |                                       |                   |  |              | Perubahan Status Anak | 2 dokumen    |  |       |                    |                    |                 |   |
| <b>2.06.2.<br/>.06.01<br/>.01.17</b> | <b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>    |   |                                       |                   | <b>Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b> | <b>100 %</b> |                       |              |  |       | <b>346.446.200</b> | <b>397.000.000</b> |                 |   |
| 2.06.2.<br>06.01.0<br>1.17.01        | Pengelolaan Sarana dan Prasarana SIAK                             | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan | Lingkup Kabupaten |  |              | IP Phone              | 5 unit       | Dukungan sebesar 34,86 % terhadap cakupan pengelolaan informasi administrasi Administrasi Kependudukan | 100 % | 132.432.700        | 110.000.000        | Sedang Berjalan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                                      |   |   |                                       |                   |  |              | Printer wifi          | 1 unit       |  |       |                    |                    |                 |   |



|                       |                            |   |                                       |                   |  |  |   |            |  |       |            |            |                 |   |          |
|-----------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--|--|---|------------|--|-------|------------|------------|-----------------|---|----------|
|                       | Kependudukan               | n   |                                       |                   |  |  |   |            | informasi Administrasi Kependudukan  |       |            |            |                 |   | an Sipil |
|                       |                            |   |                                       |                   |  |  | Kajian pelayanan administrasi kependudukan                                    | 1 dokumen  |  |       |            |            |                 |   |          |
| 2.06.2.06.01.01.17.06 | Pengembangan Aplikasi SIAK | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan | Lingkup Kabupaten |  |  | Pengembangan Aplikasi permohonan Akta online dan Aplikasi cokolit data online | 2 Aplikasi | Dukungan sebesar 6,97 % terhadap cakupan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan | 100 % | 18.425.300 | 69.000.000 | Sedang Berjalan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |          |

Tabel 4.2.  
**RUMUSAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 2019  
 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020**

OPD: **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Sumber Dana: APBD Provinsi

| NO                                | URUSAN<br>,<br>PROGRA<br>M,<br>KEGIATA<br>N | PRIORIT<br>AS<br>DAERAH | SASARA<br>N<br>DAERA<br>H | LOKASI | INDIKATOR KINERJA |        |                   |            |                |        | PAGU<br>INDIKAT<br>IF (RP) | PRAKIRA<br>AN MAJU | KETERANGAN            |     |
|-----------------------------------|---|-------------------------|---------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|------------|----------------|--------|----------------------------|--------------------|-----------------------|-----|
|                                   |   |                         |                           |        | HASIL PROGRAM     |        | KELUARAN KEGIATAN |            | HASIL KEGIATAN |        |                            |                    | JENIS<br>KEGIAT<br>AN | OPD |
|                                   |   |                         |                           |        | TOLOK<br>UKUR     | TARGET | TOLOK UKUR        | TARGE<br>T | TOLOK<br>UKUR  | TARGET |                            |                    |                       |     |
| 1                                 | 2   | 3                       | 4                         | 5      | 6                 | 7      | 8                 | 9          | 10             | 11     | 12                         | 13                 | 14                    | 15  |
| ===== <i>NIHIL</i> =====<br>===== |   |                         |                           |        |                   |        |                   |            |                |        |                            |                    |                       |     |

Tabel 4.3.

**RUMUSAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 2019  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020**

**SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL**

**JUMLAH  
PAGU : Rp. 1.300.000.000**

**Sumber Dana: DAK**

| NO                            | URUSAN,<br>PROGRAM,<br>KEGIATAN                          | PRIORITAS<br>DAERAH  | SASARAN<br>DAERAH                                   | LOKASI                   | INDIKATOR KINERJA                                       |            |                              |                  |   |            | PAGU<br>INDIKATI<br>F (RP) | PRAKIRA<br>AN MAJU | KETERANGAN             |  |  |
|-------------------------------|--|--|---|--------------------------|---|------------|------------------------------|------------------|---|------------|----------------------------|--------------------|------------------------|--|--|
|                               |  |  |   |                          | HASIL PROGRAM   |            | KELUARAN KEGIATAN            |                  | HASIL KEGIATAN  |            |                            |                    | JENIS<br>KEGIA<br>TAN  | OPD  |  |
|                               |  |  |   |                          | TOLOK<br>UKUR   | TARGE<br>T | TOLOK UKUR                   | TARGET           | TOLOK<br>UKUR   | TARGE<br>T |                            |                    |                        |  |  |
| 1                             | 2  | 3  | 4   | 5                        | 6   | 7          | 8                            | 9                | 10  | 11         | 12                         | 13                 | 14                     | 15   |  |
| 2.06.2.0<br>6.01.01.<br>15    | Program<br>Pelayanan<br>Pendaftaran<br>Penduduk          |  |   |                          | Cakupan<br>pelayana<br>n<br>pendaftar<br>an<br>penduduk | 20%        |                              |                  |   |            |                            | 570.000.<br>000    | 666.575.<br>000        |  |  |
| 2.06.2.06<br>.01.01.15<br>.33 | Pencatatan<br>dan<br>penerbitan<br>Identitas<br>Penduduk | Peningkatan<br>kualitas<br>penyelenggar<br>aan<br>pemerintahan | Meningkat<br>nya Tata<br>Kelola<br>Pemerinta<br>han | Lingkup<br>Kabupat<br>en |   |            | Kartu Tanda<br>Penduduk      | 4.000<br>keping  | Dukungan<br>sebesar<br>40%<br>terhadap<br>cakupan<br>pelayanan<br>pendaftaran<br>penduduk | 100 %      | 450.000.<br>000            | 500.000.0<br>00    | Sedang<br>Berjala<br>n | Dinas<br>Kependuduk<br>an dan<br>Pencatatan<br>Sipil |  |
|                               |  |  |   |                          |   |            | Kartu tanda<br>Penduduk (DAK | 4.000<br>keping  |   |            |                            |                    |                        |  |  |
|                               |  |  |   |                          |   |            | Kartu Keluarga               | 15.500 set       |   |            |                            |                    |                        |  |  |
|                               |  |  |   |                          |   |            | Kartu Keluarga<br>(DAK)      | 15.500 set       |   |            |                            |                    |                        |  |  |
|                               |  |  |   |                          |   |            | Perekaman KTP-el<br>penduduk | 6.000<br>orang   |   |            |                            |                    |                        |  |  |
|                               |  |  |   |                          |   |            | Karti Identitas<br>Anak      | 20.000<br>keping |   |            |                            |                    |                        |  |  |

|                               |  |   |                                       |                   |  |  |   |                |   |       |                    |                    |                 |   |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------|--|--|---|----------------|---|-------|--------------------|--------------------|-----------------|---|
| 2.06.2.06<br>.01.01.15<br>.34 | Pencatatan dan penerbitan Dokumen Pindah Datang Penduduk | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan | Lingkup Kabupaten |  |  | Surat Keterangan Pindah   | 1000 dokumen   | Dukungan sebesar 20 % terhadap cakupan pelayanan pendaftaran penduduk | 100 % | 30.000.000         | 37.500.000         | Sedang Berjalan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                               |  |   |                                       |                   |  |  | Surat Keterangan Datang   | 1016 dokumen   |   |       |                    |                    |                 |   |
|                               |  |   |                                       |                   |  |  | Surat Keterangan Pindah (DAK)                                     | 980 dokumen    |   |       |                    |                    |                 |   |
|                               |  |   |                                       |                   |  |  | Surat Keterangan Datang (DAK)                                     | 1000 dokumen   |   |       |                    |                    |                 |   |
| 2.06.2.06<br>.01.01.15<br>.35 | Penyusunan Profil dan Monitoring Evaluasi Kependudukan   | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan | Lingkup Kabupaten |  |  | Laporan perkembangan penduduk semester I, semester II dan tahunan | 3 dokumen      | Dukungan sebesar 20 % terhadap cakupan pelayanan pendaftaran penduduk | 100 % | 50.000.000         | 85.200.000         | Sedang Berjalan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                               |  |   |                                       |                   |  |  | Profil kependudukan   | 1 dokumen      |   |       |                    |                    |                 |   |
| 2.06.2.06<br>.01.01.15<br>.38 | Pendataan Kependudukan                                   | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan | Lingkup Kabupaten |  |  | Pemutakhiran Data Kependudukan Warga Panti Asuhan                 | 1 dokumen      | Dukungan sebesar 20 % terhadap cakupan pelayanan pendaftaran penduduk | 100 % | 40.000.000         | 43.875.000         | Sedang Berjalan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                               |  |   |                                       |                   |  |  | Surat Keterangan Pindah   | 1800 dokumen   |   |       |                    |                    |                 |   |
| <b>2.06.2.06.01.01.16</b>     | <b>Program Administrasi Pencatatan Sipil</b>             |   |                                       |                   |  |  | <b>Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>                         | <b>96,08 %</b> |   |       | <b>295.000.000</b> | <b>315.000.000</b> |                 |   |

|                                      |   |   |                                       |                   |  |   |                       |              |   |             |                    |                    |                 |   |
|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------|--|---|-----------------------|--------------|---|-------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|
| 2.06.2.06<br>.01.01.16<br>.01        | Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran                          | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan | Lingkup Kabupaten |  |   | akta kelahiran        | 5000 dokumen | Dukungan sebesar 35% terhadap cakupan pelayanan Pencatatan Sipil    | 100 %       | 140.000.000        | 150.000.000        | Sedang Berjalan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                                      |   |   |                                       |                   |  |   | akta kelahiran (DAK)  | 1000 dokumen |   |             |                    |                    |                 |   |
| 2.06.2.06<br>.01.01.16<br>.02        | Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian          | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan | Lingkup Kabupaten |  |   | Akta Perkawinan       | 70 dokumen   | Dukungan sebesar 26,08% terhadap cakupan pelayanan Pencatatan Sipil | 100 %       | 55.000.000         | 65.000.000         | Sedang Berjalan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                                      |   |   |                                       |                   |  |   | Akta Perceraian       | 1 dokumen    |   |             |                    |                    |                 |   |
|                                      |   |   |                                       |                   |  |   | Akta Perkawinan (DAK) | 70 dokumen   |   |             |                    |                    |                 |   |
|                                      |   |   |                                       |                   |  |   | Akta Perceraian (DAK) | 1 dokumen    |   |             |                    |                    |                 |   |
| 2.06.2.06<br>.01.01.16<br>.03        | Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Perubahan Status Anak | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan | Lingkup Kabupaten |  |   | Akta kematian         | 5000 dokumen | Dukungan sebesar 35 % terhadap cakupan pelayanan Pencatatan Sipil   | 100 %       | 100.000.000        | 100.000.000        | Sedang Berjalan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                                      |   |   |                                       |                   |  |   | akta kematian (DAK)   | 1000 dokumen |   |             |                    |                    |                 |   |
|                                      |   |   |                                       |                   |  |   | Perubahan status anak | 2 dokumen    |   |             |                    |                    |                 |   |
| <b>2.06.2.06<br/>6.01.01.<br/>17</b> | <b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>    |   |                                       |                   |  | <b>Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi</b> |                       |              |   | <b>100%</b> | <b>435.000.000</b> | <b>500.000.000</b> |                 |   |



|                       |   |   |                                       |                   | Kependudukan |  |   |            |  |       |             |             |                 |   |
|-----------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------|--------------|--|---|------------|--|-------|-------------|-------------|-----------------|---|
| 2.06.2.06.01.01.17.01 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana SIAK                   | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan | Lingkup Kabupaten |              |  | IP Phone  | 5 unit     | Dukungan sebesar 20 % terhadap cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan | 100 % | 100.000.000 | 110.000.000 | Sedang Berjalan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                       |   |   |                                       |                   |              |  | Printer wifi  | 1 unit     |  |       |             |             |                 |   |
|                       |   |   |                                       |                   |              |  | Komputer KTP-el                                     | 2 unit     |  |       |             |             |                 |   |
|                       |   |   |                                       |                   |              |  | Gigabyteswitch                                      | 3 unit     |  |       |             |             |                 |   |
|                       |   |   |                                       |                   |              |  | Jaringan tower                                      | 2 unit     |  |       |             |             |                 |   |
|                       |   |   |                                       |                   |              |  | Acces point   | 1 buah     |  |       |             |             |                 |   |
|                       |   |   |                                       |                   |              |  | Pemeliharaan perangkat SIAK (DAK)                   | 1 paket    |  |       |             |             |                 |   |
|                       |   |   |                                       |                   |              |  | Pemeliharaan jaringan tower (DAK)                   | 1 paket    |  |       |             |             |                 |   |
| 2.06.2.06.01.01.17.02 | Pengelolaan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan | Lingkup Kabupaten |              |  | Scan dokumen buku register akta catatan sipil       | 660 buku   | Dukungan sebesar 15 % terhadap cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan | 100 % | 130.000.000 | 150.000.000 | Sedang Berjalan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                       |   |   |                                       |                   |              |  | Penjilitan dokumen kependudukan                     | 500 buku   |  |       |             |             |                 |   |
|                       |   |   |                                       |                   |              |  | Scan dokumen buku register akta catatan sipil (DAK) | 2.600 Buku |  |       |             |             |                 |   |
| 2.06.2.06.01.01.17.03 | Pengelolaan database kependudukan                       | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan | Lingkup Kabupaten |              |  | Data agregat kependudukan                           | 30 buku    | Dukungan sebesar 15 % terhadap cakupan pengelolaan informasi administrasi              | 100 % | 40.000.000  | 50.000.000  | Sedang Berjalan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

|                               |                               |   |                                       |                   |  |  |   |            |  |       |             |             |                 |   |
|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--|--|---|------------|--|-------|-------------|-------------|-----------------|---|
|                               |                               |   |                                       |                   |  |  |   |            | kependudukan   |       |             |             |                 |   |
| 2.06.2.06<br>.01.01.17<br>.04 | Fasilitasi Inovasi Pelayanan  | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan | Lingkup Kabupaten |  |  | Publikasi pelayanan adminduk (DAK)  | 2 paket    | Dukungan sebesar 20 % terhadap cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan | 100 % | 100.000.000 | 110.000.000 | Sedang Berjalan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                               |                               |   |                                       |                   |  |  | Publikasi di pameran  | 1 kali     |  |       |             |             |                 |   |
|                               |                               |   |                                       |                   |  |  | Sosialisasi kebijakan adminduk  | 600 orang  |  |       |             |             |                 |   |
|                               |                               |   |                                       |                   |  |  | Kajian pelayanan administrasi kependudukan                                  | 1 dokumen  |  |       |             |             |                 |   |
| 2.06.2.06<br>.01.01.17<br>.05 | Pemanfaatan Data Kependudukan | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan | Lingkup Kabupaten |  |  | Perjanjian kerjasama pemanfaatan data                                       | 5 dokumen  | Dukungan sebesar 15 % terhadap cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan | 100 % | 35.000.000  | 50.000.000  | Sedang Berjalan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.06.2.06<br>.01.01.17<br>.06 | Pengembangan Aplikasi SIAK    | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan | Lingkup Kabupaten |  |  | Pengembangan Aplikasi permohonan Akta online dan Aplikasi cokit data online | 2 Aplikasi | Dukungan sebesar 15 % terhadap cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan | 100 % | 30.000.000  | 30.000.000  | Sedabg Berjalan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2019 merupakan dokumen penting yang harus dilaksanakan oleh OPD guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mengingat hal tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Rencana Kerja ini memuat rencana program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil, yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten dan DAK Non Fisik;
2. Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholders berkewajiban melaksanakan program-program dalam Rencana Kerja dengan sebaik-baiknya;
3. Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada pendekatan baru dalam sistem penganggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Rencana anggaran program dan kegiatan dalam Rencana Kerja ini diharapkan dapat terrealisasi sesuai dengan kebutuhan mengingat jumlahnya masih mengacu pada jumlah pagu indikatif. Namun demikian jumlah tersebut belum sesuai dengan kebutuhan riil untuk tahun 2019, sehingga diharapkan adanya penambahan anggaran yang memadai dari APBD Kabupaten Kulon Progo khususnya terkait peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan tugas. Harapan kami, semoga dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dapat diimplementasikan secara bertanggung jawab dan bermanfaat dalam memberikan kontribusi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 ini disusun untuk dapat dijadikan acuan bagi segenap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan untuk diketahui oleh para stakeholder yang berkepentingan.

Kulon Progo, 30 Juli 2018  
Kepala Dinas,

